

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung mengarah pada kebijakan intervensi, yaitu kebijakan yang bersifat campur tangan dalam berbagai urusan, baik dalam masalah internasional, masalah regional, ataupun masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin besar pada periode setelah Perang Dunia II, bahkan pada saat sekarang ini. Politik intervensi ini dilakukan Amerika Serikat secara terang-terangan tanpa mengindahkan norma-norma dalam negerinya, Negara lain, dan peradilan yang berlaku dalam hubungan internasional.

Politik intervensi bagi Amerika Serikat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dalam bentuk nyata. Setiap tindakan yang dilakukan harus bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya sendiri. Amerika Serikat sering menggunakan jalan pintas dalam mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jalan pintas ini biasanya tidak menggunakan prosedural peradilan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat dan Internasional. Dalam hal ini PBB merupakan salah satu wahana yang dijadikan legitimasi oleh Amerika Serikat untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kepentingannya.¹

Langkah politik intervensionis yang telah dijalani Amerika Serikat sejak lama ternyata dilanjutkan oleh Presiden Barack Obama di era kepemimpinannya (2009-2017). Intervensi oleh Barack Obama yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini adalah intervensi dalam

¹ Fita Farma, *Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Perkembangan Islam di Turki*, Repository University of Riau, 2015.
<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7264/4.BAB%20II.PDF?sequence=4> (diakses pada 22 Agustus 2017)

bentuk militer, yang demikian dekat dengan konsep *coercive-diplomacy*, sebuah istilah yang dipinjam dari Studi Diplomati, dimana langkah diplomasi yang ditempuh bergantung pada langkah-langkah paksaan atau hukuman seperti sanksi ekonomi, politik dan tekanan militer karena menggunakan perang atau tekanan militer sebagai alat negosiasi. Selanjutnya sebagai studi kasus, di era pemerintahan Presiden Barack Obama, dalam kendalinya, Amerika Serikat telah mengintervensi Libya, Korea Selatan dan Korea Utara, Suriah, serta Ukraina.

Berbicara mengenai politik luar negeri pada masa Obama maka tidak akan jauh dari kebijakan partai Demokrat. Bambang Cipto dalam bukunya yang berjudul *Politik dan Pemerintahan Amerika* menjelaskan tentang Pendukung terbesar Partai Demokrat berasal dari kalangan buruh dan keluarganya, mereka berpendidikan dibawah SLTA, pemilih berkulit hitam, Yahudi, kelompok berpenghasilan rendah, dan kalangan liberal, pemilih muda dan pemilih beragama Katolik. Dalam bidang politik luar negeri adanya kecenderungan kuat di kalangan Partai Demokrat bahwa mereka memiliki semacam tanggung jawab moral untuk membela kepentingan Israel.²

Ciri khas dari partai demokrat adalah partai yang lebih liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat sendiri. Dari sisi politik kaum liberalis percaya bahwa politik bukan hanya sekedar tentang kekuasaan. Kaum liberalis sebagaimana diusung Partai Demokrat menjunjung tinggi kebebasan individu, mereka mencoba menciptakan berbagai saran dan instrument untuk melindungi kebebasan individu seperti lembaga-lembaga pembela hak asasi manusia, adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, otonomi daerah dan perlindungan terhadap *civil rights*.

² Cipto, Bambang. *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Lingkar
Buku: Yogyakarta. 2007

Keanggotaan Partai Demokrat lebih bervariasi, tidak ada dominasi yang terlalu signifikan dalam diri Partai Demokrat ketika dilihat dari ras dan warna kulit. Sepertiga dari anggota Partai Demokrat adalah bukan keturunan kulit putih yaitu sekitar 60% adalah orang kulit hitam, 23% orang kulit putih dan sisanya adalah orang keturunan Hispanik.³

Pada kasus intervensi Amerika Serikat di Ukraina, berawal dari demonstrasi yang dimulai dari akhir bulan November sampai Februari ini merupakan demonstrasi terbesar sejak Ukraina merdeka tahun 1991 bahkan lebih besar dari peristiwa revolusi oranye tahun 2005.⁴ Demonstrasi tersebut merupakan reaksi dari kekecewaan sebagian besar rakyat Ukraina yang pro Uni Eropa terhadap penangguhan penanda tanganan *EU-Ukraine Association Agreement* yang berujung pada ditolaknya penanda tanganan integrasi tersebut oleh Presiden Yanukovych.

Tekanan demi tekanan yang dilancarkan demonstran pro-Uni Eropa membuat pejabat pemerintahan tidak tahan menghadapi gelombang demonstrasi. Parlemen yang sebelumnya dikuasai oleh pendukung Yanukovych, mulai mengambil kontrol kepemimpinan negara. Hal ini dibuktikan dengan pengunduran diri ketua parlemen, Volodymyr Rybak yang merupakan sekutu Yanukovych. Posisi ketua parlemen selanjutnya digantikan oleh Oleksander Turchynov yang merupakan sekutu Yulia Tymoshenko-lawan politik Yanukovych. Parlemen

³ Astuti, Widya. 2016. *Perbedaan Persepsi George W Bush dan Barack Obama dalam Menghadapi Ancaman Terorisme*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bantul. (dapat diakses pada: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7728/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>)

⁴ Fadly, Muhammad. *Kebijakan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Menolak Menanda Tangani Ue-Ukraine Association Agreement dengan Uni Eropa Tahun 2013*. Jom FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Riau.

berusaha bertindak cepat dalam mengakhiri krisis dan dengan bantuan diplomat Uni Eropa akhirnya mayoritas suara parlemen memberikan suara untuk mosi tidak percaya dan memulihkan konstitusi yang membatasi wewenang presiden dan mengubah aturan hukum yang memungkinkan pembebasan Yulia Tymoshenko tanpa perlu tanda tangan presiden. Parlemen mempertimbangkan beberapa pilihan yakni untuk memakzulkan presiden atau memaksa presiden mengundurkan diri dan mempercepat pemilu.⁵

Hal tersebut membuat Ukraina segera memilih pejabat sementara untuk berada diposisi Presiden sebagai pengganti dari presiden Yanukovych yang telah diturunkan, yakni Oleksandr Turchynov. Kondisi Ukraina masih dalam instabilitas setelah keputusan pemberhentian Yanukovych. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan parlemen, pemilihan presiden diselenggarakan pada 25 Mei 2015. Pemilihan presiden diikuti sekitar 21 kandidat dari berbagai partai politik maupun independen. Akhirnya pemilu Ukraina tahun 2014 dimenangkan oleh Petro Poroshenko, seorang pengusaha pro-Eropa yang masuk dalam daftar calon presiden melalui jalur independen. Petro Poroshenko mendapatkan suara sebesar 56 persen suara sehingga dinyatakan menang secara langsung tanpa perlu diadakan putaran kedua.²⁰ Petro Poroshenko kemudian harus menghadapi kekuatan Rusia yang dimulai dari peningkatan tensi di Semenanjung Krimea yang merupakan wilayah Ukraina bagian selatan yang di dominasi penduduk berbahasa Rusia.⁶

Transisi politik ini mengakibatkan ketidakpuasan dari rakyat Krimea yang mayoritas adalah rakyat keturunan Rusia dan pro terhadap Rusia. Ketidakpuasan tersebut berujung pada lepasnya Krimea dari Ukraina dan memilih untuk bergabung dengan Rusia. Referendum ini

⁵ *Ibid.*, Hlm. 10

⁶ *Ibid.*, Hlm. 12

diadakan pada 16 Maret 2014 dengan menanyakan apakah penduduk Krimea ingin bergabung dengan Federasi Rusia atau mengembalikan konstitusi Krimea 1992⁷ dan status Krimea sebagai bagian dari Ukraina.

Gambar 1.1
Letak Krimea antara Ukraina dan Rusia.



Sumber: *Jejaktapak.com*, 2015.⁸

Keadaan ini mengundang perhatian dunia terutama bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk membantu Ukraina. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah memorandum berjudul “Selamatkan Ukraina” yang dipublikasikan tanggal 12 Februari 2014 dalam majalah Rusia, *Zavtra*, dikemukakan bahwa kudeta di Ukraina yang menggunakan metode fasis dan Nazi merupakan strategi

⁷ Pada 26 februari 1992, pemimpin tertinggi Krimea mengganti nama wilayah Krimea menjadi *Republic of Krimea* tanpa persetujuan dari otoriter Ukraina. Selanjutnya pada bulan Mei, Parlemen Krimea memproklamasikan independen Krimea dan mengeluarkan konstitusi pertamanya yang kemudian diamandemen pada 6 Mei 1992.

⁸ Dapat diakses pada:

<https://www.jejaktapak.com/2015/06/11/crimea-benteng-rusia/>

Barat untuk mengancam Federasi Rusia. Memorandum itu ditulis oleh kelompok ahli *Izborsk*, kelompok intelektual berpengaruh dalam lingkaran *think-thank* Presiden Rusia. Memorandum itu secara detail juga memprediksi konsekuensi dari pergantian rezim di Kyiv terhadap kepentingan strategis Rusia dan bencana besar bagi masa depan Rusia. Selain itu, memorandum tersebut menyatakan bahwa AS dan UE bertanggung jawab terhadap proyek pergantian rezim di Ukraina. Memorandum itu kemudian merekomendasikan agar Rusia bersama dengan AS untuk berkonsultasi menghindari krisis di bawah Memorandum Budapest atas Kedaulatan Ukraina tahun 1994. Dalam Memorandum tersebut disebutkan bahwa AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina menyepakati akan menahan diri untuk menggunakan ancaman terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik Ukraina apabila Ukraina melucuti senjata nuklirnya.⁹

Menteri luar negeri Amerika Serikat John Kerry mengancam rencana tersebut dan menerangkan, apa yang terjadi di wilayah itu adalah cerminan dari peristiwa aneksasi Krimea.¹⁰ Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap referendum tersebut tidak sah dan menuduh Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea. Mereka menuduh bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan dibawah tekanan Rusia dan menganggap referendum yang dilakukan oleh krimea tidak sah. Amerika Serikat dan Inggris segera memberi tanggapan, Presiden Barack Obama melalui Deputy Menteri Luar Negeri-nya Williams Burns datang ke Kiev diikuti oleh Inggris melalui Menteri

⁹ Kamasa, Frassminggi. *Krisis Ukraina dan Dampaknya Terhadap Tatanan Politik Global dan Regional*. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 11, 1 Juni 2014. Hh. 79-108. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Jakarta.

¹⁰ Deutsche Welle. 2014. *AS dan UE Tolak Referendum di Ukraina Timur* (dapat diakses pada: <http://www.dw.com/id/as-dan-ue-tolak-referendum-di-ukraina-timur/a-17616698>)

Luar Negeri-nya William Hague bertemu dengan pimpinan baru Ukraina dan perwakilan IMF di Kiev. Pertemuan ini membahas bagaimana negara-negara Barat menyelamatkan Ukraina dari tekanan Rusia.¹¹

Telah ada desakan dari para legislator Amerika Serikat kepada Presiden Barack Obama untuk mengirimkan pasukan dan peralatan militer ke Ukraina. Pasukan dan peralatan itu dinilai akan membantu Ukraina menghadapi Rusia yang mulai mengumpulkan tentaranya di perbatasan timur Ukraina. Mike Rogers selaku ketua komite intelijen DPR Amerika Serikat dalam wawancara “Meet the Press” di NBC, telah mendesak Obama mengirimkan pasukan medis, peralatan radio, dan sistem persenjataan pertahanan. Senator Dick Durbin dari Partai Demokrat asal Illinois mengatakan dalam wawancara “Face the Nation” di CBS, pengiriman senjata ke Ukraina tidak boleh dikesampingkan. Adapun Senator dari Partai Republik, Kelly Ayote, mengatakan dalam wawancara CBS bahwa Ukraina sudah meminta bantuan persenjataan ringan dari NATO. Menurut dia, Amerika Serikat harus mengirimkan bantuan peralatan komunikasi dan bantuan teknis untuk Ukraina. Senator Robert Menendez, yang mengepalai Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika, mengatakan dari siaran langsung CNN di ibukota Kyiv, bahwa “ribuan” pasukan Rusia kini berada di Ukraina untuk mendukung kelompok gerilyawan separatis. Menurutnya, Amerika, Uni Eropa dan NATO “harus memperkuat pasukan Ukraina untuk bertempur guna membela diri”¹²

¹¹ Mega Chintia Gunadi, Upaya Ukraina Menghadapi Rusia atas Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014, 2014.

¹² VOA Indonesia. 2014. Senator AS: Barat Seharusnya Persenjantai Ukraina (dapat diakses pada:

<https://www.voaindonesia.com/a/senator-as-barat-seharusnya-persenjantai-ukraina/2434325.html>)

Telah terjadi pula pemberontakan yang dilakukan pasukan separatis di wilayah Ukraina timur. Tidak lama setelah lepasnya Krimea dari Ukraina, pasukan separatis di beberapa kota di Ukraina bagian timur mulai melakukan pemberontakan dan menuntut untuk memisahkan diri dari Ukraina dan ikut bergabung dengan Rusia. Pemerintah Amerika Serikat menuding pemerintah Rusia memasok peralatan militer seperti tank dan peluncur roket ke para separatis pro-Rusia di Ukraina. Washington juga mengklaim Moskow mengerahkan pasukan ke wilayah perbatasan antara kedua negara bekas Uni Soviet itu.¹³ Hal tersebut membuat bantuan persenjataan semakin dibutuhkan di Ukraina.

Namun pemerintah Amerika Serikat hanya memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Sanksi ekonomi tersebut berupa pembekuan aset Rusia di Amerika, dan larangan pemberian visa bagi pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam intervensi militer Rusia di Krimea. Amerika Serikat juga meminta *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa untuk mengirimkan misi pemantauan ke Ukraina. Misi tersebut bertujuan memantau konflik, menjamin perlindungan hak asasi manusia anggota kelompok minoritas, mencegah konflik perbatasan, mempromosikan penghormatan terhadap integritas teritorial, dan memelihara perdamaian, stabilitas, serta keamanan di Ukraina terutama Krimea. Upaya negara Barat untuk membuat Rusia mundur dari Krimea dengan ancaman dan pemberian sanksi menemui kegagalan. Upaya

¹³ Detik News. 2014. *AS Tuding Rusia Berikan Dukungan Militer ke Separatis Ukraina*
(dapat diakses pada: <https://news.detik.com/internasional/d-2637598/as-tuding-rusia-berikan-dukungan-militer-ke-separatis-ukraina>)

negosiasi yang dilakukan antara pihak Rusia dan Amerika juga berakhir tanpa kesepakatan. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat berharap Rusia membuka upaya dialog dengan pemerintah baru di Kiev dan juga menarik pasukannya di Krimea ke pangkalan mereka serta mengizinkan pemantau internasional masuk ke Krimea.¹⁴

Dari berbagai intervensi yang telah dipaparkan di atas, Amerika Serikat terlihat tidak menumpahkan segala kemampuan militernya dalam intervensinya di Ukraina. Meskipun sebenarnya secara moral berkewajiban mengadakan intervensi, yaitu berdasarkan Memorandum Budapest dari tahun 1994. Ketika itu, setelah pembubaran Uni Soviet, Ukraina menyatakan bersedia menyerahkan 1.600 kepala nuklir. Uranium dari kepala nuklir tersebut digunakan AS di pembangkit listrik tenaga nuklirnya selama dua puluh tahun. Sebagai imbalannya, AS, Inggris dan Rusia menyatakan berkewajiban menjaga integritas Ukraina. Setelah Moskow melanggar kesepakatan itu, setidaknya AS dan Inggris secara moral wajib mengambil tindakan.

Amerika dan NATO sejak tahun 2014 dengan menerapkan strategi pengaruh militer di Eropa Timur, menempatkan sistem-sistem rudalnya di Polandia dan Rumania, juga menempatkan pasukan secara sementara atau permanen di tiga negara Laut Baltik termasuk Estonia, Latvia yang berbatasan dengan Rusia, dan Lithuania, dan pada saat yang bersamaan Georgia dan Moldova, tetapi Amerika dan NATO tidak menempatkan pasukan militernya di Ukraina.¹⁵

¹⁴Passenheim, Antje. *Ukraina dan Tekanan Moral bagi Obama*, 2014. (<http://www.dw.com/id/ukraina-dan-tekanan-moral-bagi-obama/a-17469092> diakses pada 22 Agustus 2017)

¹⁵Irna, *NATO: Pasukan di Estonia Balasan untuk Rusia Duduki Krimea*, 2017. (<http://parstoday.com/id/news/world-i34500->

Kongres AS selanjutnya mempertimbangkan penjatuhan sanksi di bidang perdagangan serta investasi. Demikian halnya dengan pembekukan dana, penghentian pemberian visa dan sejumlah langkah lainnya. Namun Kerry berkali-kali menekankan, Washington ingin bekerjasama dengan Rusia dalam mencari solusi bagi Ukraina.

Dengan melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat dalam intervensi menangani lepasnya Krimea dari Ukraina cenderung tidak tegas karena tidak melibatkan pasukan militer di dalam pelaksanaannya. Padahal Rusia dengan jelas melanggar kesepakatan yang telah tercantum dalam memorandum "*Save Ukraine*" dimana kedua belah pihak harus berkonsultasi supaya dapat menghindari krisis di bawah Memorandum Budapest atas kedaulatan Ukraina tahun 1994. Selain itu telah banyak pula desakan dari berbagai senator dan ketua komite intelijen untuk mengirimkan bantuan pasukan militer ke Ukraina, namun Amerika hanya memberikan kecemasan sanksi ekonomi kepada Rusia. Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri karena tindakan Amerika Serikat di Ukraina berbeda dengan tindakan di daerah lain yang selalu melibatkan pasukan militernya secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Amerika Serikat tidak menggunakan kekuatan militer dalam menangani kasus lepasnya Krimea dari Ukraina

C. Landasan Teoritik

1. Model Aktor Rasional

Model Klasik oleh Graham T. Allison ini disebut

[nato pasukan di estonia balasan untuk rusia duduki krimea](#)
(diakses pada 13 Desember 2017)

sebagai Model Aktor Rasional, yang menurutnya negara dapat dengan benar mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negeri dan membuat keputusan terbaik yang memungkinkan dalam hal keuntungan dan biaya, memperhitungkan tujuan dan nilai negara.¹⁶

Model ini menggambarkan bahwa pemerintahan yang berjalan adalah bagian dari keputusan Politik Luar Negeri, yakni memperhitungkan untung dan ruginya terlebih dahulu secara logis sebelum diambil. Sehingga disebut rasional, dalam artian setiap keputusan yang diambil adalah bentuk aktualisasi pemikiran seseorang atau dalam konteks ini adalah aktor. Orang yang rasional menjelaskan secara rinci tujuan-tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia, dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tiap pilihan alternatif sebelum membuat putusan.¹⁷

Penerapan model pilihan rasional ini bila diterapkan dalam langkah intervensi yang di lakukan oleh Amerika dalam kasus aneksasi Rusia terhadap Krimea maka akan dapat kita lihat berbagai pilihan langkah yang dapat di ambil oleh Amerika dalam mengambil kebijakan. Amerika Serikat sebagai Aktor akan dengan hati-hati memikirkan segala risiko dan konsekwensi yang akan dihadapi dari setiap langkah yang diambil. Selain itu keputusan yang diambil amerika tentunya haruslah keputusan terbaik dimana Amerika Serikat memikirkan keuntungan dan kerugian dari langkah yang diambil.

¹⁶ Jackson, R & Sorensen, G. 2016. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹⁷ Ed. Nugroho, W., Bambang. Dougherty, James & Pfaltzgraff Jr., Robert 2014. *Teori-teori Hubungan Internasional*. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul.

Dalam mengatasi kasus di Ukraina, pengiriman bantuan militer untuk menghadapi Rusia akan mengakibatkan pengeluaran dana militer yang sangat besar, sehingga Amerika Serikat lebih memilih untuk melakukan intervensi non-militer karena langkah tersebut membuat Amerika Serikat tidak perlu mengeluarkan dana militer dalam menjalankan kebijakan intervensinya di Ukraina.

2. Konsep dan Pendekatan Strategi Keamanan

Definisi dari strategi adalah cara mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan yang tersedia dalam lingkungan atau lokasi tertentu. Adapun dalam penerapannya dapat dengan menggunakan kekuatan militer untuk tujuan perang militer, menggunakan kekuatan militer dan non militer untuk tujuan perang militer. Dan dapat juga gabungan dari keduanya (Grand Strategy) untuk upaya pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam Hal ini Colin S. Gray memaparkan mengenai dua pendekatan strategi yang bertolak dari asumsi bahwa kesenjangan antara tujuan dan sarana akan menimbulkan resiko. Pendekatan pertama adalah pendekatan *sequential*, yaitu menempatkan setiap langkah secara bertahap sampai tujuan akhir (merongrong, mengucilkan, memotong logistik, mengacaukan garis hubungan, barulah melakukan invasi). Pendekatan ini dilakukan jika dalam hal sarana tidak cukup besar, waktu dan sasaran tidak kritis. Kedua, Komulatif: menggunakan upaya secara serentak dengan sebanyak mungkin sarana tersedia dalam tempat waktu yang terbatas. Pendekatan ini dilakukan, jika sarana cukup, waktu dan sasaran kritis.¹⁸

¹⁸ Tjarsono, Idjang. 2014. *Strategi Keamanan dalam Paradigma Realis*. Universitas Riau: Pekanbaru. (Dapat diakses pada:

Dalam kasus ini, Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk memberikan tekanan yang berarti kepada Rusia sedangkan posisi Rusia sedang berada dalam posisi yang kuat. Sehingga Amerika Serikat memilih untuk melakukan pendekatan yang pertama dalam menjalankan kebijakannya di Ukraina.

D. Hipotesa

Berdasarkan paparan teoritik di atas, maka dapat dibuat hipotesis mengenai Amerika Serikat memilih opsi non-militer dalam intervensinya dalam kasus lepasnya Krimea karena:

1. biaya militer yang tinggi.
2. Kesenjangan antara kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat di Ukraina dengan tujuannya memberikan tekanan kepada Rusia.

E. Metode Penelitian

Dalam menulis tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang bersumber dari bahan bacaan baik cetak berupa buku, jurnal, karya ilmiah ataupun digital seperti berita yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁹

F. Jangkauan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis memberi batasan penelitian yaitu Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama dimana krisis Krimea sedang berlangsung. Meskipun fokus tulisan ini adalah kebijakan

<https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/6240/1/32.%20IDJANG%20-%20STRATEGI%20KEAMANAN%20DALAM%20PARADIGMA%20REALIS.pdf>

¹⁹ Jatmika, Sidik. 2016. Skripsi: Metodologi dan Romantikanya. HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

luar negeri terhadap Ukraina namun tidak memungkiri akan membahas mengenai hubungan di antara Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia sebagai contoh maupun acuan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini mengupas tentang subjek penelitian yakni Amerika Serikat dalam melaksanakan politik luar negerinya terhadap Ukraina, khususnya pada masa pemerintahan Barack Obama.

BAB III

Bab ini membahas tentang konflik Aneksasi Krimea oleh Rusia secara lebih komprehensif. Dijelaskan pula apa yang terjadi di Ukraina dan bagaimana Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam menghadapi feneomena tersebut.

BAB IV

Bab ini menganalisis mengenai pilihan-pilihan yang dimiliki Amerika Serikat dalam politik intervensi terhadap Aneksasi Krimea oleh Rusia. Dijelaskan pula mengenai peluang baik keuntungan maupun kerugian yang akan diakibatkan oleh setiap pilihan tersebut.

BAB V

Bab ini merupakan penutup yang menyimpulkan isi dari hasil penelitian.